

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA JAYA
KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

PROPOSAL

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Sastra Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH :

MERSI FEBRIANTI
NPM. 200411008

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
TAHUN 2023**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBAYARAN PAJAK BUNI DAN BANGUNAN
(PBB) DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI
NAMA : MERSI FEBRIANTI
NPM : 200411008
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



SARJAN, M. S. Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada : Kamis, 21 Maret 2024

Hari : Kamis

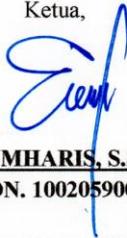
Tanggal : 21

Bulan : Maret

Tahun : 2024

TIM PENGUJI

Ketua,



EMILIA EMHARIS, S.SOS., M.SI
NIDN. 1002059002

Sekretaris,



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. **RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si**

()

2. **DESRIADI, S.Sos., M.Si**

()

3. **ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si**

()

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proposal yang berjudul : **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** ini, dapat penulis selesaikan. Proposal ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) Program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan *jahiliyah* yang mengatur cahanya sehingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses memperoleh gelar di bangku kuliah hingga penulisan proposal ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa semua akan indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dan selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan

bimbingan demi tercapainya penyelesaian proposal ini serta sudah banyak memotivasi penulis untuk tetap sabar dan tegar.

3. Bapak **Emilia Emharis S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat kemudahan dan pencerahan dalam menyelesaikan proposal ini.
4. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian proposal ini serta sudah banyak memotivasi penulis untuk tetap sabar dan tegar.
5. Seluruh dosen dan tenaga dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Ambra** dan Ibunda **Yanti (Almh)**. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya, juga sudah menjadi penyemangat terhebat saya.
7. Teman-teman di Kelas Administrasi Negara A Angkatan 2020, sukses untuk kita semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Teluk Kuantan, 02 Oktober 2023

Penulis

MERSI FEBRIANTI
NPM.200411008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGHANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori Manajemen	13
2.1.3 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	17
2.1.4 Teori Partisipasi Dan Masyarakat	27
2.1.4.1 Teori Partisipasi.....	27
2.1.4.2 Teori Masyarakat.....	30
2.1.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat	34
2.1.5 Teori Perpajakan	35
2.1.5.1 Fungsi Pajak	39
2.1.5.2 Unsur Pajak	41

2.1.5.3 Jenis Pajak	42
2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak	43
2.2 Kerangka pemikiran.....	45
2.3 Hipotesis Kerja	45
2.4 Definisi Operasional	46
2.5 Konsep Variabel, indicator dan item penilaian.....	47
2.6 Teknik Pengukuran.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Populasi Dan Sampel	50
3.2.1 Populasi	50
3.2.2 Sampel.....	50
3.3 Sumber Data Penelitian.....	52
3.3.1 Data Primer	52
3.3.2 Data Sekunder.....	52
3.4 Lokasi Penelitian.....	53
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5.1 Kuesioner	53
3.5.2 Observasi	53
3.5.3 Dokumentasi	53
3.6 Metode Analisis Data.....	54
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Desa Jaya Kopah.....	5
Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 3.1 Jumlah Populasi Dan Sampel.....	51
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	:
Lampiran 2	:
Lampiran 3	:
Lampiran 4	:

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh :

**MERSI FEBRIANTI
NPM : 200411008**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk unsur Perangkat Desa Jaya karena jumlahnya relative kecil yakni 8 orang, maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan Sampel. Untuk unsur masyarakat menggunakan metode *Random Sampling* metode pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, yang jumlah pengambilan sampelnya menggunakan rumus slovin yakni didapat 43 orang, total responden pada penelitian ini berjumlah 51 responden. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pengetahuan dan Keahlian, Pekerjaan Masyarakat, Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf, dan Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

By :

**MERSI FEBRIANTI
NPM : 200411008**

This research was carried out in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The aim of this research was to find out how the community participates in paying land and building taxes in Jaya Kopah Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how community participation is in paying land and building taxes in Jaya Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for elements of the Jaya Village apparatus was because the number was relatively small, namely 8 people, so the sample was determined using a saturated sampling method, that is, the entire population was used as a sample. For elements of society using the Random Sampling method, the sampling method from the population is carried out randomly without paying attention to the strata in the population, the number of samples taken using the Slovin formula is 43 people, the total number of respondents in this study was 51 respondents. The indicators used in this research are: Knowledge and Skills, Community Employment, Level of Education and Illiteracy, and Belief in Certain Cultures

Keywords : *Community Participation, Land and Building Tax*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa dalam pembangunan nasional pemerintah melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, sosial budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Guna untuk meningkatkan pendapatan Negara untuk pembangunan Nasional, salah satunya adalah sumber pendapatan dalam sektor perpajakan. Diantara jenis-jenis Pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan menungkatkan pembangunan Nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pembangunan di Indonesia tentu saja membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Jika dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang diterima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam Negeri dan bantuan Luar Negeri. Penerimaan dari dalam Negeri diperoleh dari sektor Minyak dan Gas (Migas) dan sektor Non Migas (Pajak dan non Pajak). Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan Pajak adalah pemasukan dana dan penghasilan yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya Pajak seiring dengan lajunya pertumbuhan

perekonomian, dan stabilitas politik sedangkan penerimaan disektor Migas sesuai hukum alam jika di eksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Bagaimanapun Pajak dipungut tidak terlalu membebani masyarakat dan adil dalam pelaksanaannya. Masalah perpajakan termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya: “Pengenaan dan Pemungutan Pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang”. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah primadona penerimaan Negara yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat adalah Sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami suatu wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai suatu kebudayaan dan memiliki pembagian kerja dalam waktu *relatife* lama dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Pembangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara. Karena besarnya pajak seiring laju pendidikan, perekonomian dan stabilitas politik. Sedang penerimaan migas sesuai dengan hukum alam jika dieksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah primadona penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintahan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Pembangunan nasional akan berhasil apa bila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di suatu negara. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha melibatkan seluruh rakyat dalam pembangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan dasar hukum berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan perkebunan (PBB P3) masih berada dibawah kewenangan pemerintah pusat.

Dengan dijadikannya PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pajak bumi dan bangunan yang pada awalnya termasuk kedalam pajak Negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Adapun dasar hukum mengenai pajak bumi dan bangunan tercantum dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh

bupati/walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada dibawahnya yaitu perangkat desa atau pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak. Dari berbagai jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut, salah satu pajak yang dikelola daerah yaitu pajak bumi dan bangunan.

Wajib pajak juga harus mempunyai surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak mereka tidak mau memenuhi kewajibannya yang sekali setahun itu. Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi kegenerasi. Berikut tabel wajib pajak di desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Di Desa Jaya Kopah

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Yang Membayar Pajak
1.	2020	315	287
2.	2021	354	324
3.	2022	403	379

Sumber : Kantor Kepala Desa Jaya Kopah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak di Desa Jaya Kopah setiap tahunnya mengalami peningkatan, Di mana untuk tahun 2020 wajib

pajak berjumlah 315 sedangkan yang membayar pajak berjumlah 287, pada tahun 2021 wajib pajak sebanyak 354 yang membayar pajak berjumlah 324, sedangkan pada tahun 2022 wajib pajak berjumlah 403 yang membayar pajak 379. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memahami mengenai pajak ini.

Berdasarkan prariset yang telah dilakukan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih terlihat permasalahan diantaranya :

1. Masih banyak masyarakat yang sekali tidak tahu mengenai pajak bumi bangunan ini. hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan mengenai pajak bumi bangunan
2. Banyak masyarakat yang kurang sadar mengenai pajak, tidak mengetahui fungsi dari pajak dan untuk apa membayar pajak hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan mengenai pajak bumi bangunan.
3. Tingkat pertanyaan-pertanyaan ditengah masyarakat mengenai bagaimana perhitungan pajak ini, sebab sebagian masyarakat membandingkan kenapa yang mempunyai tanah dan bangunan yang lebih luas ternyata dikenakan Pajak PBB yang lebih kecil dibandingkan dengan dirinya yang mempunyai tanah dan bangunan lebih kecil. Hal ini menyebabkan ada beberapa masyarakat yang enggan membayarnya karena mereka menilai perhitungan pajak yang tidak jelas.

Berdasarkan permasalahan diatas hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pajak ini agar mengetahui fungsi dari pajak dan untuk apa

membayar pajak, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai penghitungan pajak bumi dan bangunan ini sehingga menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang berakibat enggan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak di Desa tersebut untuk itu peneliti mengambil judul penelitian **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen yang sangat penting di dalam sebuah penulisan karya ilmiah maupun penelitian. Oleh sebab itu maka seorang peneliti harus dapat mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Berdasarkan perumusan

masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu “Untuk mengetahui analisis partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada:

- a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara.
- b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat menyurat, pembuatan agenda dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Chisyanti (dalam Kacaribu, 2020 : 5) Pengertian administrasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas.

Menurut Haryadi (dalam Rosalin Sovia dkk, 2022 : 3) Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan mengumpulkan dan mencatat data dan informasi secara sistematis untuk memberikan informasi dan memudahkan pencarian secara umum dalam kaitannya satu sama lain.

Administrasi dalam arti luas, yaitu kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber – sumber untuk mencapai tujuan efektif dan efisien Silalahi (dalam Rosalin sovia dkk , 2022 : 4).

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, maka administrasi menurut saya adalah suatu kegiatan yang terdapat proses kerjasama

yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

Menurut Priffiner (dalam Hiplunudin Agus, 2022 : 23) yang memberikan penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai berikut :

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan Desa pada buku register Desa. Ruang lingkup administrasi pemerintahan Desa (Permendagri No 47 Tahun 2016) terdiri dari :

1. Administrasi Umum

Administrasi umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku Administrasi Umum.

- a. Buku Peraturan Di Desa
- b. Buku Keputusan Kepala Desa
- c. Buku Inventaris Kekayaan Desa
- d. Buku Aparat Pemerintah Desa
- e. Buku Kas Tanah Desa
- f. Buku Tanah Di Desa
- g. Buku Agenda
- h. Buku Expedisi
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

2. Administtrasi Penduduk

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Bukuk Administrasi Penduduk.

Administrasi Penududuk terdiri dari :

- a. Buku Data Induk Penduduk Desa
- b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa
- c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan
- d. Buku Data Penduduk Sementara

3. Aministrasi Keuangan

Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku Administrasi Keuangan.

- a. Buku Anggaran
- b. Buku Kas Umum
- c. Buku Kas Harian Pembantu
- d. Buku Kas Pembantu Pajak
- e. Buku Kas Pembantu Bank

4. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

- a. Buku Rencana Pembangunan
- b. Buku Kegiatan Pembangunan
- c. Buku Inventaris Proyek
- d. Buku Kaer-kader Pembangunan/Pemberayaan Masyarakat.

2.1.2 Teori Manajemen

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat

terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya.

Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan, berdasarkan Bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisir secara baik.

Menurut (Ridha Muis, 2022 : 2) para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam, berikut pendapat para ahli tentang manajemen :

1. Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan.
1. George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.

2. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu.

Menurut pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan manajemen adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat kegiatan pengorganisasian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dan dalam perkembangannya proses manajemen adalah langkah-langkah strategis yang juga adalah manfaat dari manajemen tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlunya bekerja sama atau bantuan orang lain. Keberhasilan suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan pemimpin/manajer untuk mengatur kerja sama tersebut. Kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan, kegiatan organisasi merupakan kegiatan manajemen.

Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya. Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan diri sendiri pun akan semakin besar, paling tidak dengan prinsip tersebut manajer dapat mengurangi ketidak-benaran dalam pekerjaannya.

Menurut Winardi (dalam Gandung Muhammad, 2021 : 29) prinsip-prinsip manajemen yaitu :

1. Pembagian kerja
2. Otoritas dan tanggung jawab
3. Disiplin
4. Kesatuan perintah
5. Kesatuan arah
6. Dikalangkannya kepentingan individu
7. Penghargaan/ balas jasa
8. Sentralisasi
9. Rantai bertangga
10. Keteraturan
11. Keadilan
12. Stabilitas pelaksanaan pekerjaan
13. Inisiatif
14. Jiwa korps

Menurut Winardi (dalam Gandung Muhammad, 2021 : 25) memahami unsur-unsur manajemen (*tools of management*) sangat diharuskan bagi setiap Manajer. Karena unsur yang ada di organisasi itulah yang harus diatur sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang manakah yang belum atau kurang atau tidak ada. Adapun Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari orang (*man*), uang (*money*), metode (*methods*), bahan-bahan (*materials*), mesin-mesin (*machines*), dan

pemasaran (*market*) disingkat dengan 6M. Berikut ini pemaparan masing-masing unsur-unsur dari manajemen tersebut :

1. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional pelaksana.
2. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. *Machines* yaitu mesin-mesin alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.

2.1.3. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau *human resource department*.

Menurut Mondy dan Noe (dalam Larasati, 2018 : 6) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia (*human resource department*) sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu dan organisasi. Hani Handoko (dalam Larasati, 2018 : 6).

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. (Sinambela Poltak Lijan, 2021 : 7).

Dari pendapat para ahli tentang manajemen sumber daya manusia diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan semua unsur yang menjadi kekuatan atau daya manusia untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Notoatmodjo (dalam Cai Cia, 2022 : 9), tujuan-tujuan MSDM terdiri dari empat tujuan, yaitu :

1. Tujuan Masyarakat (*Societal Objective*)

Bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat, suatu organisasi yang berada ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negative terhadap masyarakat.

2. Tujuan Organisasi (*Organizational Objective*)

Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada, perlu untuk memberikan adanya kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi

secara keseluruhan. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir dari suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan, oleh karena itu, suatu unit atau bagian manajemen sumber daya di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian yang lain di organisasi tersebut.

3. Tujuan Fungsi (*Functional Objective*)

Untuk memelihara kontribusi bagian-bagian lain agar mereka (sumber daya manusia) melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain setiap sumber daya manusia atau karyawan dalam organisasi itu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.

4. Tujuan Personal (*Personnel Objectivel*)

Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan pribadi karyawan sudah seharusnya dipenuhi, sebagai motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan itu sendiri.

Menurut Zahera (2020 : 12-13) terdapat beberapa komponen-komponen dalam sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Fungsi manajemen (*manajemen fungcions*)

a) *Planning* (Fungsi Perencanaan)

Planning merupakan suatu aktivitas menyusun, tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. *Planning* dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi scara keseluruhan

dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuannya itu. pihak manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum pengambilan tindakan kemudian menelaah rencana yang terpilih apakah sesuai dan bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi yang lain tak akan bisa berjalan tanpa *planning*.

Perencanaan (*planning*) dari sudut pandang jenjang manajemen bisa dibagi beberapa jenjang:

- *Top Level Planning* (perencanaan jenjang atas), perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis. memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. *top level planning* ini penekanannya pada tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung-jawab manajemen puncak.
- *Middle Level Planning* (perencanaan jenjang menengah), dalam jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. dan tanggung jawab perencanaan level ini berada pada manajemen menengah
- *Low Level Planning* (perencanaan jenjang bawah) perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga planing ini mengarah kepada aktivitas operasional. dan perencanaan ini menjadi tanggung-jawab manajemen pelaksana

b) *Organizing* (Fungsi Pengorganisasian)

Organizing adalah suatu aktivitas penagturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa yang lebih sederhana *organizing* merupakan seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung-jawab dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan

c) *Directing* (Fungsi Pengarahan) *Directing* alias fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan yang lain.

d) *Controlling* (Fungsi Pengendalian / Pengawasan) *Controlling* merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan.

2. Fungsi operasi

a. *Pengadaan (procurement)*

Fungsi pengadaan adalah mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Pengembangan (development)

Pengembangan berkaitan dengan peningkatan keahlian melalui pelatihan/penataran, yang penting bagi kinerja pekerja karena perubahan teknologi yang terus berkembang, penyesuaian kembali jabatan, dan meningkatnya kerumitan tugas-tugas manajerial.

c. Kompensasi (compensastion)

Kompensasi adalah pemberian upah yang cukup dan wajar kepada tenaga kerja atas kontribusi atau jasa mereka terhadap tujuan-tujuan organisasi. Kompensasi biasanya diterima dalam bentuk uang ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain selama sebulan.

d. Integrasi (integration)

Pegawai secara individu diminta untuk mengubah pandangan yang selama ini kurang menguntungkan bagi perusahaan agar sesuai dengan keinginan serta tujuan perusahaan.

e. Perawatan/pemeliharaan (maintenance)

Pemeliharaan berarti berusaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada.

f. Pensiun (separation)

Berhubungan dengan pegawai yang sudah lama bekerja pada perusahaan. Fungsi utamanya adalah menjamin pensiun pegawai.

Menurut Sucahyowati Hari (2017 : 10-14) Tingkatan manajemen dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Manajemen Tingkat Atas (*Top Level Management*)
Manajemen Tingkat Atas atau sering disebut dengan *Top Management* (Manajemen Puncak) atau *Executives* (Eksekutif) adalah Manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan-jabatan seperti *CEO (Chief Executive Officer)*, *CFO (Chief Financial Officer)*, *COO (Chief Operational Officer)*, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama dan lain sebagainya. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya.

Beberapa tugas atau fungsi utama manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- Menentukan tujuan perusahaan manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya, dapat berupa tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendeknya.
- Membuat kerangka rencana dan kebijakan-manajemen tingkat atas membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan.
- Mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah.
- Mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan seperti sumber daya keuangan, aset tetap, tenaga kerja dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam organisasi.

- Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi/perusahaan.
- Sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media dan lain-lainnya.

2. Manajemen Tingkat Menengah (*Middle Level Management*)

Manajemen Tingkat Menengah atau *Middle Level Management* adalah manajer yang berada di bawah Manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti *General Manager, Plant Manager, Factory Manager, Regional Manager* ataupun *Division Manager*. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Manajer-manajer ini juga menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing.

Adapun fungsi-fungsi dan tugas manajer di manajemen tingkat menengah ini diantaranya adalah :

- Menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh Manajemen Puncak (manajemen tingkat atas) dan menjelaskannya ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Manajemen tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah.

- Mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - Mengrekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh department atau unit kerjanya.
 - Memotivasi karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk departemennya. Misalnya menawarkan berbagai insentif dan tunjangan kepada karyawannya sehingga termotivasi dan melakukan yang terbaik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
 - Mengawasi dan mengarahkan karyawan-karyawan di departemennya. Contohnya seperti menyiapkan laporan penilaian kinerja karyawannya.
 - Bekerjasama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya.
 - Melaksanakan rencana yang disusun oleh Manajemen tingkat atas.
3. Manajemen Tingkat Pertama (*First Level Management*) Manajemen Tingkat Pertama atau disebut juga dengan *First Level Management* atau *First Line Management* adalah Manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti *Department Manager*, *Section Manager*, *Superintendent*, Mandor atau *Supervisor*. Para Manajer di manajemen Tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas.

Beberapa fungsi dan tugas Manajemen tingkat pertama ini adalah sebagai berikut :

- Memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah.
- Menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan.
- Menyediakan lingkungan kerja yang sehat and aman untuk para karyawan operasional.
- Membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan.
- Berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran-saran karyawan serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif.
- Menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk/layanan sesuai dengan perencanaan.
- Bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim.
- Meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi/perusahaan.

2.1.4 Teori Partisipasi Dan Masyarakat

2.1.4.1 Teori Partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Isbandi dkk (dalam Mustanir Ahmad dkk, 2022 : 32) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun pengertian partisipasi berdasarkan para ahli:

Menurut Prasadja (dalam Setiawan Agustina, 2022 : 34) Partisipasi sebagai bentuk kontribusi terorganisasi yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum pemerintah. Posisi pemerintah dan masyarakat adalah setara dan saling membutuhkan satu sama lain atau sering dikenal dengan hubungan kemitraan.

Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2022: 56) mengartikan Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut Theresia dkk (Rizal, 2014 : 197) Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan mengenai :

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Dusseldorp (dalam Astuti dkk, 2019 : 26-27) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Menurut Dwiningrum (dalam Dalimoenthe, 2023 : 56) membedakan partisipasi menjadi empat jenis antara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Adapun 4

indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan anatarlain:keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, kesedian memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesedian memberikan sumbangan uang dan materi, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan,apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Dari beberapa definisi partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan nya saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. Penulis berpendapat teori yang tepat digunakan untuk partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah teori Dwiningrum (dalam Dalimoenthe, 2022 : 56). Teori tersebut salah satu nya berisi tentang

partisipasi dalam pelaksanaan, dimana penulis ingin melihat pelaksanaan dari partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap tahun nya.

2.1.4.2 Teori Masyarakat

Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata “*syaraka*”, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan “*society*” yang pengertiannya adalah interaksi social, perubahan social, dan rasa kebersamaan.

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Adapun pengertian masyarakat berdasarkan para ahli:

Menurut Marx Karl (dalam Yulianti, 2022 : 21) Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan Karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.

Menurut Horton dan Chester (dalam Yulianti, 2022 : 22) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatife mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Menurut Soleman (dalam Isdairi, 2021 : 23) Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami suatu wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dn memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatife lama, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, dan mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut.

Menurut Soekanto (dalam Isdairi, 2021 : 23) Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang

- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

Menurut (Rukin, 2019 : 15) Tipologi masyarakat adalah pengelompokan masyarakat, baik berdasarkan sumber mata pencarian masyarakat (minalnya masyarakat petani, masyarakat perkebunan, masyarakat nelayan, masyarakat hutan), maupun berdasarkan wilayah tinggalnya (masyarakat desa atau *rural community*, dan masyarakat kota atau *urban community*). Dan tipologi masyarakat dapat di tinjau dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian
 - Desa industry, dimana pandangan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industry kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut
 - Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha dibidang perikanan (pantai, laut dan darat).

2. Dari segi pola pemukiman

- *Farm village type*, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang disekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat, hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern.
- *Nebulous farm village type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar diluar tempat bersama sawah lading mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektifitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat.
- *Arrenged isolated farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpai di Negara-negara Barat Tradisi disini kurang kuat, individualistis lebih menonjol, lebih berorientasi pada bidang perdagangan.
- *Pure isolated farm village type*, yaitu desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah lading mereka masing-masing. Tipe ini kebanyakan di negara-negara Barat. Tradisi kurang kuat, individualistis menonjol dan juga berorientasi perdagangan.

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suryawan (dalam El Adawiyah Sa'diyah 2023 : 81-82) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) , adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, antara lain :

- a. Pengetahuan dan keahlian dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut.
- b. Pekerjaan masyarakat biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi untuk proyek tertentu.
- c. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d. Kepercayaan terhadap budaya tertentu masyarakat dengan tingkat eterogenitas yang tinggi,terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

2.1.5 Teori Perpajakan

Kewajiban Negara yang paling utama adalah melaksanakan pembangunan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu banyak

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Alsar Andri dan Himsar Siregar (2021 : 85) Pajak adalah hal penting bagi setiap Negara karena merupakan pendapatan utama bagi Negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas Negara di samping adanya pendapatan di bidang yang lain. Selain berpengaruh pada pendapatan Negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan.

Menurut Soemitro (dalam Putra, 2017 : 11) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat (dalam Hamidah dkk, 2023 : 38) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum.

Menurut Alsar Andri dan Himsar Siregar (2021 : 87) Landasan Teori pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Landasan Teori Pajak Konvensional

Landasan teori pajak konvensional ini terdapat beberapa perbedaan, namun hakikatnya maksud dan tujuannya sama. Landasan teori pajak konvensional dibagi dua :

Pertama, teori kekuasaan (pajak sebagai upeti). Menurut teori ini, rakyat membayar pajak kepada penguasa. Dalam kondisi ini pajak bermakna upeti atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak umpeti seperti ini adalah Negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa. Ketundukan rakyat kepada penguasa harus ditunjukkan secara material berupa pajak, karena penguasa merupakan titisan dewa yang hadir atas petunjuk langsung Tuhan dan bertindak untuk kepentingan Tuhan, dan karena rakyat hidup dari hasil bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang semuanya milik penguasa atau ada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, kepatuhan rakyat kepada penguasa tidak cukup hanya pada tingkat kesadaran abstrak dan simbolik, akan tetapi harus diaktualisasikan dalam bentuk nyata dan material berupa pajak atau upeti. Artinya, pajak upeti sebagai ketundukan rakyat kepada penguasa, baik secara individu maupun secara kolektif.

Kedua, teori perjanjian, ini berangkat dari kesadaran masyarakat akan sistem perpajakan upeti kepada pengusaha tidak adil dan cenderung sebagai bentuk penindasan penguasa terhadap rakyat. Kemudian muncul pemberontakan-pemberontakan dan penolakan akan sistem upeti ini. Mereka menuntut agar pajak upeti yang mereka bayar digunakan untuk memberikan jaminan untuk

mendapatkan hak yang sepadan dari penguasa. Pajak ini diwajibkan atas dasar adanya hubungan timbal balik Negara dengan anggota masyarakat.

b. Landasan Teori Pajak Menurut Islam

Ketika kas Negara dalam islam (Baitulmal) tidak terdapat lagi harta atau kekurangan dalam menjalankan pemerintahan, sementara sumbangan sukarela dari kaum muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka dalam islam menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum muslim. Pada dasarnya harta tidak ada kewajiban selain zakat. Namun, apabila zakat telah diselesaikan, sesudah itu ternyata ada kebutuhan mendesak, misalnya keperluan biaya militer, maka wajib bagi orang kaya mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Jadi diperbolehkannya pajak adalah :

- a. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut.
- b. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan kas Negara (Baitulmal) kosong atau tidak mencukupi.
- c. Ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan atau kaum muslim.
- d. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.
- e. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Ia bisa saja dihapuskan apabila kas Negara (Baitulmal) telah terisi kembali.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi para ahli dan UU terdapat persamaan pandangan ataupun prinsip mengenai pajak. Dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung
- 3) Dapat dipaksakan
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan atas penghasilan kena pajak tanpa ada timbal balik secara langsung dan dapat digunakan untuk meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Dan negara dalam hal ini mempunyai kekuatan memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

2.1.5.1 Fungsi Pajak

Menurut Sambodo (dalam Iryanie Emy dkk, 2018 : 41-43) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai fungsi dalam rangka pembangunan. Adapun lima fungsi pajak sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan

jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi dari pada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulasi*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Minsalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial dikehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.

3. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

2.1.5.2 Unsur Pajak

Menurut Soemitro (dalam Yusdianto, 2020 : 2) Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi

Dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Asri Ardison (2021 : 51) Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara
2. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan undang-undang
3. Sifatnya dapat dipaksakan
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayar pajak dengan kontra prestasi secara individual)
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
6. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.1.5.3 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (dalam Juhana, 2018 : 26) Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis, antara lain:

1. Menurut Golongan

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

- a) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain .
Contohnya: Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain, Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

a) Pajak Objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

a) Pajak Daerah (Lokal), Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat), Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem seperti yang di jelaskan dalam buku (Hamidah dkk, 2023: 58). Seperti yang ungkapakan sebagai berikut ini:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

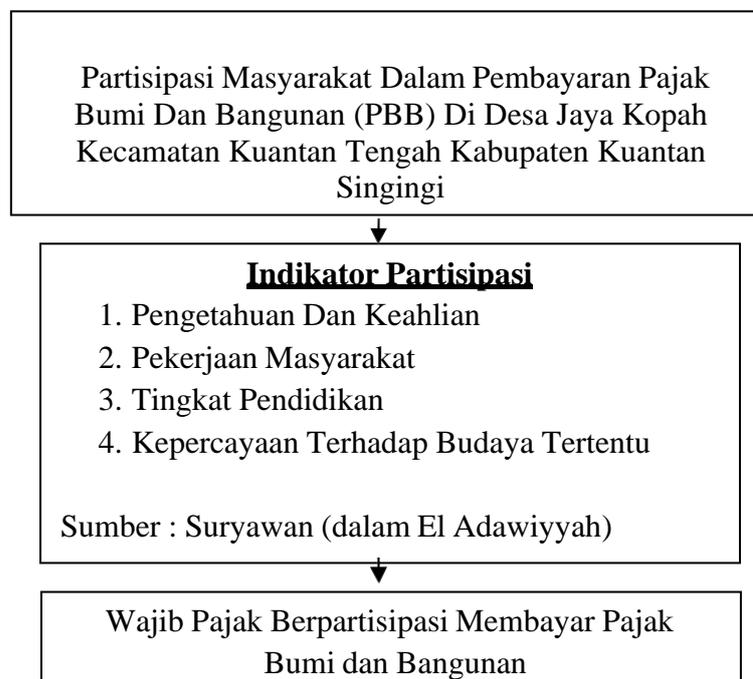
3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang da pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Peneliti Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Peneliti 2023

2.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan latar belakang masalah kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah.”

2.4 Definisi Operasional

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator :

- a) Pengetahuan dan keahlian dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut.
- b) Pekerjaan masyarakat biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi untuk proyek tertentu.
- c) Tingkat pendidikan dan buta huruf Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- d) Kepercayaan terhadap budaya tertentu masyarakat dengan tingkat eterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

2.5 Konsep Variable, Indikator, Dan Item Penilaian

Operasional variabel adalah aspek yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya

Konsep Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Ukuran
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Suryawan (dalam El Adawiyah Sa'diyah 2023 : 81-82)	1. Pengetahuan Dan Keahlian	- Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Keahlian Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	2. Pekerjaan Masyarakat	- Petani - Pedagang	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	3. Tingkat Pendidikan	- SMP - SMA	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
	4. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	- Kepercayaan Terhadap Pemerintah Pengelolaan Pajak Dan Fungsinya - Budaya Sadar Pajak	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat *statistic*, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2017 : 7)

Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, *realistic, actual*, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara *sistematis, factual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Rujaka, 2018 : 1). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode *statistic* yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bagaimana sebenarnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017 : 80).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono, 2017 : 81).

Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil. (Sugiyono, 2017 : 85).

Populasi masyarakat Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi wajib pajak berjumlah 1567. Untuk mempermudah dalam memperoleh presentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana \longrightarrow n : Jumlah sampel
N : Populasi

E : Presepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang Dapat di tolelir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \qquad n = \frac{1567}{1 + 35,25}$$

$$n = \frac{1567}{1 + 1567 (0,15)^2} \qquad n = \frac{1567}{36,25}$$

$$n = 43,22 = 43 \text{ (digenapkan)}$$

Untuk lebih jelasnya yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah		Presentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Desa Jaya	1	1	2%
2.	Sekretaris Desa Jaya	1	1	2%
3.	RT/RW	3	3	6%
4.	Kepala Dusun	3	3	6%
5.	Masyarakat	1559	43	84%
Jumlah		1567	51	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2023

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 51 orang. Untuk perangkat Desa digunakan Teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa berjumlah 8 orang, dan

untuk unsur masyarakat digunakan *Simpel Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk unsur masyarakat berjumlah 43 orang.

3.3 Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk Menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Penelitian Analisis Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian di Desa Jaya Kopah karena ingin mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawab. (Sugiyono, 2017 : 162).

3.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2017 : 166).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, (Sugiyono, 2017 : 240). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis tabel ini yaitu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$X = \frac{\sum(F \cdot X)}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

- P : Persentase (%)
 F : Frekuensi
 X : Rata-rata
 $\sum(F \cdot X)$: Jumlah skor kategori jawaban
 N : Jumlah responden

$$\text{Rata persen} = \frac{\text{Rata-rata skor}}{\text{Banyaknya klasifikasi jawaban}} \times 100\%$$

Analisis data juga menggunakan Skala Likert untuk memudahkan analisa pernyataan yang diajukan kepada responden. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan skor 5 dan skor terendah 1 Sugiyono (2015 : 165).

• Sangat terlaksana / sangat berpartisipasi / sangat tercapai	Skor 5
• Terlaksana / berpartisipasi / tercapai	Skor 4
• Cukup terlaksana / cukup berpartisipasi / cukup tercapai	Skor 3
• Kurang terlaksana / kurang berpartisipasi / kurang tercapai	Skor 2
• Tidak terlaksana / tidak berpartisipasi / tidak tercapai	Skor 1

Selanjutnya untuk mengukur bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

1. Sangat terlaksana : 81% - 100%
2. Terlaksana : 61% - 80%
3. Cukup terlaksana : 41% - 60%
4. Kurang terlaksana : 21% - 40%
5. Tidak terlaksana : 0% - 20%

3.6.1 Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelayanan dan item pertanyaan indikator dalam penelitian ini dikualifikasikan dalam 5 (lima) kategori yaitu : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik. Untuk mengarahkan analisis data uraian masing-masing pengukuran tersebut dapat dinilai yaitu :

Sangat Baik = Jika rata-rata penilaian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 4,20 – 5,00

Baik = Jika rata-rata penilaian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 3,40 – 4,19

Cukup Baik = Jika rata-rata penilaian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 2,60 – 3,39

Kurang Baik = Jika rata-rata penilaian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 1,80 – 2,59

Tidak Baik = Jika rata-rata penilaian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 1,00 – 1,79

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2023-2024																					
		Agus			Sep			Okt			Nov			Des			Jan						
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal	x	x	x	x	x	X	x															
2.	Bimbingan dan Konsultasi Proposal																						
3.	Seminar Proposal																						
4.	Perbaikan dan Revisi Proposal																						
5.	Penelitian di Lapangan																						
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																						
7.	Ujian Skripsi																						
8.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																						

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2023